

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
2024**

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor BNN Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam mencapai sasaran dan target indikator kinerja 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Sumatera Barat, sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN Provinsi Sumatera Barat tahun depan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024. Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang.

Padang, 19 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat



Tri Julianto Djatiutomo, S.I.K.,M.M

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Keadaan Geografis

Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang, kapal tradisional, atau speedboat, para pengedar narkoba beraksi di perairan Indonesia. Narkoba masuk ke provinsi Sumbar (85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat perbatasan-perbatasan. Di provinsi Sumatera Barat narkoba masuk melalui sepanjang daerah pesisir pantai (Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Kambang dan Kepulauan Mentawai).

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN Provinsi Sumatera Barat masih sangat kurang. Jumlah keseluruhan personil pada BNN Provinsi Sumatera Barat ASN 26 orang, Polri 11 orang, PPNPN 25 orang. Berdasarkan ketentuan Daftar Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 211 Orang.

2. Hasil Evaluasi

Dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan pada poin 1 di atas, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. BNN Provinsi Sumatera Barat telah aktif mengajak pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan P4GN di Provinsi Sumatera Barat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 kab/kota	Rp 411.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 kab/kota	Rp 428.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota	Rp 827.412.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1 kawasan	Rp 72.600.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3,55 Indeks	
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	Rp 60.885.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 orang	Rp 55.630.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Instansi Pemerintah				
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	Rp 539.544.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	10 unit	
		Meningkatnya kualitas layanan reabilitas narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,57 Indeks	
	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 peta jaringan	Rp 50.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas perkara	Rp 455.000.000
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	Rp 186.190.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	95 Indeks	Rp 51.914.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 Kabupaten/Kota	
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	97,23 Indeks	Rp 5.400.976.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/ Kota	
12.	Inspektorat Utama	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	-

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Sumatera Barat, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	1 Lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbaisi Sumber Daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kabupaten / Kota TanggapAncaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotuika	1 Kelompok Masyarakat
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	150 Orang
			Layanan Suarat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	150 Orang
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	6 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	2 Lembaga
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Unit Vertikal)	1 Laporan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	5 Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	18 Orang
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non- Narkotika (Unit Vertikal)	2 Produk
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)	18 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Perkantoran	12 Layanan
			Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen

Padang , 19 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat



Tri Julianto Djatiutomo, S.I.K.,M.M